

KOTA SUKABUMI: DARI DISTRIK MENJADI GEMEENTE (1815-1914)

SUKABUMI CITY: FROM DISTRICT TO GEMEENTE (1815-1914)

Setia Nugraha

Jurusan Ilmu Sejarah UNPAD
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor
e-mail: setia_nugraha@yahoo.com

Naskah Diterima: 24 Mei 2017

Naskah Direvisi: 10 Oktober 2017

Naskah Disetujui: 22 November 2017

Abstrak

Kota Sukabumi merupakan suatu wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dibanding daerah lainnya. Pada awalnya Sukabumi merupakan pemukiman penduduk bagian dari wilayah pemerintahan District Goenoeng Parang, Onderafdeeling Tjiheulang. bagian dari Afdeeling Tjiandjoer, Residentie Preanger (Regeerings Almanaks tahun 1872). Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang berkebangsaan Belanda yang pertama kali mengenalkan nama Soekaboemi (Soeka Boemi) ke dunia luar. Awalnya ia menjelajah di Sukabumi untuk mencari lokasi tanah yang cocok bagi perkebunan. Dari sebuah pemukiman, selanjutnya Sukabumi mengalami perkembangan pesat melampaui Cianjur yang sebelumnya berada di depan garis pacu. Perkembangan ini menarik perhatian penulis. Untuk menjabarkan dinamika Kota Sukabumi (1914-1942), dilakukan kajian historis dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada asal-usul terbentuknya Kota Sukabumi, dinamika pemerintahan, sosial dan ekonomi Kota Sukabumi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Kota Sukabumi berkembang pesat dari district menjadi gemeente.

Kata kunci: Kota Sukabumi, dinamika, sosial ekonomi.

Abstract

The city of Sukabumi is a region in West Java that is experiencing rapid development compared to other regions. In the beginning, Sukabumi is a residential part of the district government area of District Goenoeng Parang, Onderafdeeling Tjiheulang. Part of Afdeeling Tjiandjoer, Residentie Preanger. (Regeerings Almanaks in 1872). Andries Christoffel Johannes de Wilde, a Dutch nationality who first introduced the name Soekaboemi (Soeka Boemi) to the outside. Initially he explored in Sukabumi to find a suitable land for plantation. From a settlement, Sukabumi subsequently experienced a rapid development beyond Cianjur previously in front of the race line. This development attracts the author's attention. To describe the dynamics of Sukabumi City (1914-1942), a historical study was conducted using historical method consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This research focuses on the origin of Sukabumi city, the dynamics of government, social and economy of Sukabumi City and what factors cause the city of Sukabumi to grow rapidly from district to gemeente.

Keywords: Sukabumi city, dynamic, socio-economy.

A. PENDAHULUAN

Kota Sukabumi adalah kota transit antara Bandung-Jakarta yang sejuk dan nyaman untuk disinggahi. Kota ini terletak di bagian selatan Jawa Barat, Berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut (koordinat 106 °45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, serta 6°50'44" Lintang Selatan. Berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja

Secara administratif, Kota Sukabumi terbagi ke dalam 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu dan Cibeureum. Jarak terjauh dari balai kota adalah Kecamatan Lembur Situ, yakni sejauh 7 km (Bappeda Kota Sukabumi: 29).

Iklm dan Curah hujan Kota Sukabumi sepanjang tahun 2013 cenderung basah. Berdasarkan hasil pemantauan dari empat stasiun pemantau, tiga di antaranya yakni Stasiun Cimandiri, Ciaul dan Cisalada mencatat bahwa setiap bulan di Kota Sukabumi terjadi hujan dengan intensitas tertentu. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari di Stasiun Cimandiri yakni sebanyak 461 mm³ dengan jumlah hari hujan 26 hari.

Penggunaan lahan di Kota Sukabumi dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah (lahan kering). Lahan bukan sawah dibedakan atas lahan pekarangan/rumah, tegal/kebun, kolam/tebat/empang dan lahan lain-lain. Dari luas wilayah Kota Sukabumi yang 4.800 ha, 32,31%-nya atau sebesar 1.551

ha digunakan untuk tanah sawah dan sisanya (66,87%) atau seluas 3.210 ha merupakan tanah kering dan lain-lain.

Fenomena yang terjadi di daerah perkotaan menunjukkan bahwa luas lahan sawah akan semakin berkurang sejalan dengan banyaknya pembangunan di bidang perumahan, perdagangan atau pun industri, sehingga fungsi lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

Pada awalnya Kota Sukabumi merupakan pemukiman penduduk bagian dari wilayah pemerintahan *District Goenoeng Parang, Onderafdeeling Tjiheulang. Afdeeling Tjiandjoer, Residentie Preanger.* (*Regeerings Almanaks* tahun 1872).

Dalam tata pemerintahan Hindia Belanda, Sukabumi pada tahun 1913 masih disebut sebagai "*hoofdplaats van het district Goenoeng Parang*". (*Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*) (ENI), hlm. 814 dan 815) Tahun 1914, nama Gunung Parang mendapat sebutan ganda. Selain disebut Gunung Parang disebut pula Sukabumi. Hal ini terjadi ketika Gunung Parang berkembang menjadi pemukiman berpenghuni pengusaha perkebunan berkebangsaan Belanda dan Cina (Mukhtar 2013:18). Status *district* (kewedanaan) Gunung Parang kemudian berubah menjadi *Onderafdeeling Soekaboemi* (Kecamatan Sukabumi), *Afdeeling Regentschappen Tjiandjoer, Residentie Preanger*, dengan luas wilayah sekitar 225 km².

Pada tahun 1914 Pemerintah Hindia Belanda mengubah *Onderafdeeling Soekaboemi* menjadi *Gemeente Soekaboemi* (Kota Sukabumi) dengan status *Burgerlijkbestuur* (pemerintahan sipil yang otonom atau kota swapraja). Dipimpin oleh seorang *Burgemeester* (Walikota). Selama 12 tahun pemerintahan belum berjalan karena belum ada pejabat yang diangkat.

Pada bulan Oktober 1926 Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Mr. G.F. Rambonnet sebagai *Eerste Burgemeester* Soekaboemi, merangkap

Sekretaris kota dengan 10 orang Anggota Dewan Kota. Sesuai undang-undang, tiga orang di antaranya adalah warga setempat dan satu orang warga keturunan Cina, yaitu: Raden Djajakoesoemah, Raden Sadeli, Raden Demang Karnabrata, dan Oeij Djin Tjiang. G.F. Rambonnet menduduki jabatan walikota sampai dengan tahun 1934.

Dalam *Regeerings Almanak* dari tahun 1934 sampai dengan tahun 1940 tidak ditemui catatan mengenai siapa yang menggantikan Mr. Rambonnet sebagai walikota. Namun demikian, dalam buku saku terbitan Bappeda Sukabumi tahun 1981 disebutkan pengganti Rambonnet secara berturut-turut sampai tahun 1942 adalah Ouwenkerk (1935-1939), A .L.A. van Unen (1940-1941), dan terakhir W.J. Ph. Van Waning (1942).

Perkembangan kota dan struktur pemerintahan Sukabumi berjalan demikian cepat melampaui Cianjur yang sebelumnya berada di depan. Pada tahun 1929, struktur tata pemerintahan Hindia Belanda untuk wilayah yang menjadi Jawa Barat berubah. Kata *Preanger* berganti Priangan. *Residenschap* Priangan dibagi menjadi tiga *afdeeling* ; *Afdeeling West-Priangan* dengan Sukabumi sebagai *hoofdplaats* (Ibukota), *Midden-Priangan* dengan ibukota Bandung, dan *Oost-Priangan* dengan ibukota Tasikmalaya. Dengan demikian Sukabumi (dan Cianjur) tergabung dalam *Afdeeling West-Priangan van de Provincie West-Java*, dengan *Hoofdafdeeling* Mr. A.A. de Waas.

Setelah Indonesia merdeka, berturut-turut terjadi perubahan nama dari *Gemeente Soeka Boemi* (1914-1942) menjadi *Soekaboemi Shi* (1942-11945), Kota Kecil Sukabumi (Undang-undang No. 17 Tahun 1950), Kota Praja Sukabumi (UU No. 1 Tahun 1957), Kotamadya Sukabumi (UU No. 18 Tahun 1965), Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (UU No. 5 Tahun 1974) dan akhirnya melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999, UU No 32 Tahun 2003 hingga sekarang menjadi Kota Sukabumi.

Kota transit yang menarik, perkembangan yang pesat, posisi yang penting dalam perekonomian Nusantara, nilai historis yang melekat namun sedikit literatur tentang kota ini menjadikan rasa penasaran dan motivasi penulis untuk membahas Kota Sukabumi. Untuk melakukan memudahkan pemahaman, tulisan ini dibatasi pada dinamika sosial ekonomi antara tahun 1914 s.d. 1942. Adapun permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana asal mula terbentuknya Kota Sukabumi; 2) Faktor apa saja yang menyebabkan Kota Sukabumi berkembang pesat dari *district* menjadi *gemeente*? Adapun penelitian ini ditujukan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut di atas.

Ada lima buku yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini. Kelima buku tersebut adalah: 1) *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, karya Prof. Dr. Nina Herlina Lubis, M.S. dkk. Buku ini memberi informasi awal pada penulis tentang kota-kota lama di Jawa Barat terutama Sukabumi yang pada awalnya merupakan bagian dari *Afdeeling Tjiandjoer*. 2) *Sejarah Provinsi Jawa Barat* karya Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis dkk. Buku ini membahas sejarah Jawa Barat dari masa prasejarah sampai zaman kolonial Belanda di Tatar Sunda. Selain itu disajikan juga informasi tentang Priangan sejak zaman Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) hingga van den Bosch (1930-1933). Informasi tentang Sukabumi dan perubahannya terangkum di buku ini. 3) *Herinneringen aan Soekaboemi* tulisan J.M. Knaud. Terbitan tahun 1980. Dalam buku ini termuat surat-surat resmi dan catatan-catatan beberapa orang yang pernah jadi mukimin di Kota Sukabumi dan terlibat dalam pemerintahan serta pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan dinamika Kota Sukabumi. Berbagai informasi seperti kehidupan sosial budaya, perkembangan ekonomi, politik dan pemerintahan juga tersaji di buku ini. 4) *Soekaboemi Tempo Doeloe* terbitan Bagian Hukum Sekotda

Soekaboemi tahun 1984. Buku ini menyajikan perkembangan pemerintahan, sarana-prasarana serta daftar walikota yang pernah menjabat di Kota Sukabumi, dilengkapi dengan sumber-sumber dokumenter berupa foto. 5) *Citra Kota Sukabumi dalam Arsip* terbitan Arsip Nasional tahun 2013. Banyak informasi yang tersaji, terutama arsip-arsip dan foto-foto tentang Kota Sukabumi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode sejarah, yakni proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif (Gottschalk dalam Herlina 2014: 57). Tahapan yang dilalui ada empat yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap heuristik merupakan proses mencari, menemukan, dan memproses sumber sejarah yang relevan. Terkait dengan pelaksanaan heuristik, penulis mendatangi Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya dan Universitas Padjadjaran. Di perpustakaan Unpad, Penulis mendapatkan *starting point* tentang sejarah kota-kota di Jawa Barat. Kemudian penulis ke Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan Jawa Barat. Dari tempat ini diperoleh buku *Sejarah Provinsi Jawa Barat dan Tradisi dan Transformasi Masyarakat Sunda*. Selanjutnya ke Perpustakaan dan Arsip Kota Sukabumi. Di tempat ini penulis memperoleh beberapa buku tentang Sukabumi dan data-data yang dapat mendukung bahasan perkembangan Sukabumi. Di Sukabumi penulis pun mengunjungi komunitas Heritage Sukabumi yang memberi masukan data dan tempat-tempat bersejarah Sukabumi. Kemudian penulis mengunjungi Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional.

Di Perpustakaan Nasional penulis mendapatkan sumber-sumber berharga berupa foto-foto. Selain foto diperoleh juga buku *Sejarah Sukabumi* karya Suryatna

Jaya, peta Sukabumi tahun 1921, 1999, dan peta laporan Amerika, serta koran dan majalah. Di Arsip Nasional penulis memperoleh *staatsblad* tentang penetapan Sukabumi sebagai *gemeente*, *besluit*, *regerings almanak* serta dokumen lain yang mendukung tulisan ini.

Setelah sumber sejarah terhimpun, penulisan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap kritik sumber. Pada tahap ini dilakukan dua jenis kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menentukan otentisitas atau keaslian sumber sejarah dengan memberi penilaian terhadap fisik sumber tersebut seperti jenis kertas yang dipakai, tinta, tulisan, huruf, watermark, dan stempel yang digunakan. Kritik intern dilakukan dengan cara penilaian intrinsik terhadap sumber tersebut, misalnya menilai penulis atau penyusun sumber yang diperoleh. Selain itu akan dilakukan juga koraborasi, yaitu mempertentangkan data yang ada dalam sumber yang didapat dengan sumber lain yang independen. Karena melalui proses ini akan diperoleh sumber yang dapat dipercaya atau kredibel.

Tahap ketiga adalah tahap interpretasi, yaitu proses menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah rangkaian kisah yang logis. Dalam tatanan operasionalnya interpretasi dilakukan secara analisis, yaitu menguraikan fakta maupun secara sistesis atau menghimpun fakta. Tahap terakhir adalah tahap historiografi, yaitu tahap penulisan peristiwa masa lampau menjadi sebuah kisah sejarah yang kronologis dan imajinatif. Untuk memudahkan pemahaman, historiografi yang dihasilkan dibagi ke dalam beberapa bab dan subbab yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Kondisi-kondisi Kota Sukabumi yang Dipertimbangan Menjadi Gemeente

Sukabumi (Soekaboemi) adalah nama yang digunakan untuk menyebut dua daerah administratif pemerintahan di Jawa Barat, yaitu Kota Sukabumi yang terletak

di kaki Gunung Gede-Pangrango dan beribukota Cikole serta Kabupaten Sukabumi yang saat ini beribukota di Pelabuhanratu.

Dalam catatan arsip Hindia Belanda, Nama Sukabumi pertama kali digunakan oleh Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang ahli bedah dan administrator perkebunan kopi dan teh berkebangsaan Belanda (*Preanger Planter*) tanggal 13 Januari 1815. Dia yang membuka lahan perkebunan di Kepatihan Tjikole. Dalam laporan surveynya, De Wilde mencantumkan nama Soeka Boemi sebagai tempat ia menginap di Kepatihan Tjikole. De Wilde lalu mengirim surat kepada temannya Nicolaus Engelhard yang menjabat sebagai administrator Hindia Belanda. Ia meminta Engelhard untuk mengajukan penggantian nama *Tjikole* menjadi *Soekaboemi* kepada Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Hindia Belanda saat itu (Knaud, 1976:8).

Terdapat dua pendapat mengenai asal nama Sukabumi yang digunakan oleh De Wilde. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sunda, yaitu *suka* dan *bumen* 'menetap', yang bermakna suatu kawasan yang disukai untuk menetap, disebabkan iklim Sukabumi yang sejuk. Pendapat kedua mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sansekerta, yaitu *suka* (kesenangan, kebahagiaan, kesukaan) dan *bhumi* (bumi, tanah) sehingga nama Sukabumi memiliki arti "Bumi yang disenangi" atau "Bumi yang disukai". Dari dua pendapat tersebut tampaknya pendapat pertama lebih mendekati kebenaran karena lebih jelas sumbernya, sementara pendapat kedua lebih mengarah pada perkiraan (kirata atau dikira-kira tapi terasa dalam kenyataan) mengingat Sukabumi kebetulan berada di daerah Sunda dan kondisinya nyaman untuk ditinggali.

2. Latar Belakang Terbentuknya Kota Sukabumi

Perkembangan Kota Sukabumi tidak dapat dilepaskan dari lima hal yakni

Perkebunan Teh, pembangunan rel kereta api jalur Batavia-Bogor-Cianjur-Bandung, Kebijakan Desentralisasi, Perubahan Pemerintahan Negeri (Bestuur Hervorming), dan keberadaan orang-orang Belanda (Eropa) di Sukabumi.

a. Perkebunan Teh

Kota Sukabumi berhubungan erat dengan perkembangan perkebunan teh di Sukabumi. Berawal dari kedatangan Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang berkebangsaan Belanda yang menjelajah di Sukabumi untuk mencari lokasi tanah yang cocok bagi perkebunan teh.

Tanaman teh pertama kali mulai dikenal di Pulau Jawa sekitar tahun 1690, Camphuys, Gubernur Jenderal, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) ke-15 menanam teh di halaman rumahnya sebagai tanaman hias untuk kesenangan (hobi).

Jenis teh yang ditanam saat itu adalah jenis Bohea (teh cina). Jenis teh ini adalah satu dari dua jenis yang masuk dalam species *Camelia Sinensis* yang kemudian dikenal sebagai teh jawa. Teh Jenis lainnya adalah *Assamica* yang dikenal sebagai teh assam.

Usaha pembudidayaan teh mulai dilakukan oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1729. VOC menganggap teh merupakan tanaman produksi yang penting dan menguntungkan. Dewan Tujuh Belas orang (*Heeren XVII*) pada tanggal 15 Maret 1728 menulis surat pada pemerintah VOC di Jawa, tentang perlunya pembudidayaan teh,

Pemerintah VOC di Jawa nampaknya tidak begitu tertarik pada budidaya teh. Dalam menjawab surat dari Dewan Tujuh Belas, pada bulan Desember pemerintah VOC di Jawa menjanjikan akan berusaha mengadakan percobaan budidaya teh. Namun usaha ini ternyata tidak memberikan hasil dan sampai tahun 1826, tidak nampak usaha yang sungguh sungguh untuk memajukan budidaya teh.

Usaha pembudidayaan teh dilanjutkan Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda, Hendrik Merkus de Kock. Ia menindaklanjuti permintaan direktur Kebun Raya, Dr. Carl Ludwig Blume, seorang botaniwan Jerman-Belanda. De Kock mengeluarkan surat keputusan Pemerintah Hindia Belanda No, 6 tanggal 10 Juni 1824. Surat Keputusan tersebut berisi permintaan kepada Kepala Perwakilan Pemerintah Hindia Belanda di Jepang untuk menugaskan Mayor Dr. Philipp Franz Von Siebold agar mengirimkan beberapa tanaman dari Jepang untuk Negeri Belanda. Walaupun teh tidak disebut dalam daftar lampiran surat keputusan tersebut namun Von Siebold mengirimkannya beserta tanaman yang diminta

Pada tahun 1826 Von Siebold kembali melakukan pengiriman sesuai pesanan Komisariss Jendral Leonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies atas nasihat inspektur Budidaya, ahli fisika yaitu Diard.

Hal penting dalam pembudidayaan teh di Hindia Belanda adalah datangnya Jacobus Isidorus Loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli pencicip teh (*expert-theeproever*) dari *Nederlandsche Handel Maatschappij* ke Jawa pada tanggal 2 September 1827. Ia kemudian mengadakan beberapa kali perjalanan dari Jawa ke Cina untuk mengumpulkan keterangan tentang penanaman dan pengolahan teh seperti yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Ketika Jacobson menjadi inspektur budidaya teh, percobaan-percobaan pembudidayaan teh terus dilakukan di antaranya di daerah Priangan. *Afdeeling* Sukabumi sebagai bagian dari *Preanger Regenschappen*, merupakan salah satu daerah percobaan perluasan budidaya teh. Tidak ada keterangan tanggal yang pasti dimulainya budidaya teh di *Afdeeling* Sukabumi. Namun dapat disimpulkan bahwa munculnya perkebunan teh di

Sukabumi sejalan dengan adanya perluasan budidaya teh yang dilakukan Jacobson pada tahun 1835.

Perkembangan berikutnya Pemerintah Hindia Belanda terus meneruskan menderita kerugian yang besar dalam mengusahakan perkebunan teh, maka pemerintah memutuskan untuk mengontrakkan beberapa kebunnya pada usahawan-usahawan swasta sebagai percobaan. Pengusaha-pengusaha ini mendapat bantuan uang muka dari pemerintah untuk bekerja, sebagai kompensasinya mereka harus menyerahkan daun yang telah diolah di kebun itu ke pabrik pusat di Jatinegara dengan harga yang telah ditentukan.

Pada tahun 1841 di daerah Priangan terdapat delapan perkebunan teh yaitu Cikajang, Jatinangor, Ciumbuleuit, Parakan Salak, Sinagar, Cisangkan (sekitar Garut), Cicurug dan Rajamandala. Dua di antaranya, yaitu Parakan Salak dan Sinagar merupakan perkebunan teh yang terdapat di *Afdeeling* Sukabumi. Walaupun hasil produksi perkebunan-perkebunan teh makin lama makin baik, namun biaya produksinya tetap lebih tinggi daripada hasil penjualannya. Pada tahun 1849 pabrik pusat di Jatinegara, yang didirikan tahun 1838 ditutup dan kontrak-kontrak dengan perkebunan diubah, hasil keseluruhan harus diolah di kebun. Baru setelah itu diserahkan kepada pemerintah dalam keadaan jadi.

Usaha tersebut di atas kurang berhasil memperbaiki keadaan, sehingga kerugian pemerintah semakin besar. Salah satu sebabnya adalah karena setelah produk itu disetor maka pemerintah langsung membayar sesuai dengan harga yang dicapai di pasaran Amsterdam. Antara tahun 1848 dan 1853, pemerintah rata-rata membayar 65,5 sen untuk setiap setengah kilogram teh kepada para pengontrak. Sebelum dikirim teh tersebut diperiksa terlebih dulu di pabrik Jatinegara.

Menjelang tahun 1850, pemerintah menentukan bahwa pemeriksaan dilakukan langsung di pabrik-pabrik pengontrak

perkebunan oleh seorang pegawai yang diangkat pemerintah. Ternyata pemeriksaan ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten tentang teh. Hal ini terjadi karena belum banyaknya ahli teh. Selain itu seringkali anggota komisi lebih tertarik dan terpengaruh oleh pesta penyambutannya daripada melakukan pengkajian teh. Demikian pula yang terjadi dengan perkebunan teh di *Afdeeling* Sukabumi.

Menteri Jajahan De Greve pada bulan Juli 1858 mengatakan bahwa pemeriksaannya pada umumnya dilakukan tanpa membuka peti. Jadi berdasarkan nama jenis tehnya dan atas kepercayaan saja. Para pengontrak Cina dari kebun Sinagar pada waktu itu baru mempersilahkan inspektur pemerintah memeriksa tehnya setelah dijamu terlebih dahulu. Sudah barang tentu minuman keras yang disuguhkan mengakibatkan pandangan inspektur itu terganggu dan tidak mengherankan kalau kemudian ternyata mutu teh itu berkurang.

Pemerintah mengalami kerugian karena harga jual sebesar f. 1,40 sampai f. 1,60 bruto dengan ongkos produksi f. 1,40. Secara keseluruhan kerugian pemerintah antara tahun 1835 dan 1840 berjumlah f. 300.000,- dan pada tahun 1846 menjadi f. 500.000,-. Setelah itu naik lagi menjadi dua kali lipat. Tahun 1860 kerugian meningkat menjadi f. 6 juta.

Dalam keadaan demikian atas usul menteri jajahan pada waktu itu, akhirnya diputuskan membebaskan perusahaan-perusahaan teh untuk disewakan kepada pengusaha-pengusaha swasta dengan harga antara f. 25 sampai f. 50,- tiap baunya. Jumlah uang sewa ini ditentukan dengan penaksiran seorang ahli. Beberapa kontrak langsung dibatalkan, yang lain setelah jangka waktunya dinyatakan habis. Dengan demikian pihak swasta mulai secara penuh mengelola perkebunan teh.

Perkebunan Parakan Salak disewakan kepada A.W. Holle pada tahun 1862. Kemudian menyusul perkebunan Sinagar dan Cirohani kepada A. Holle

pada tahun 1863. Dengan demikian keluarga Holle merupakan perintis dalam pembudidayaan teh di *Afdeeling* Sukabumi setelah kebun-kebun teh pemerintah dihapuskan.

Teh dari perkebunan-perkebunan *Afdeeling* Sukabumi sudah dikenal di pasaran Amsterdam sejak sekitar tahun 1850-an. Dimulai dengan perkebunan Sinagar pada tahun 1848 di bawah merek perusahaannya, menyusul kemudian Parakan Salak pada tahun 1852, keduanya dikenal sebagai teh Jawa. Harga teh pada tahun 1857-1862, di pasaran Amsterdam untuk produksi perkebunan Parakan Salak adalah f. 1,- dan untuk perkebunan Sinagar f. 0,89,- setiap setengah kilogramnya.

Sesudah tahun 1865 dimulailah masa budi daya teh kedua yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Awalnya para pengusaha swasta mengalami beberapa kesukaran karena bersaing dengan perusahaan pemerintah. Namun lambat laun para pengusaha teh swasta mulai eksis setelah perusahaan teh negara mengalami kerugian hingga enam juta gulden, akhirnya perkebunan teh berada di tangan pihak swasta.

Perkembangan budi daya teh pada awalnya masih agak sukar karena ada rasa takut pemerintah Hindia Belanda akan pengaruh buruknya. Perluasan budi daya teh memerlukan banyak tenaga dan hal ini dapat berpengaruh buruk terhadap budi daya kopi. Selain itu kesulitan terbesar adalah pengangkutan yang tidak memadai dan mahal. Jalan-jalannya tidak baik sehingga teh harus diangkut di atas punggung kerbau dan kuda atau oleh kuli. Dengan demikian perluasan perkebunan teh menjadi lambat, walaupun demikian hasil awal beberapa perkebunan tidak dapat dikatakan buruk sama sekali. Misalnya saja pada tahun 1856 Perkebunan Teh Sinagar dengan luas 250 bau menghasilkan 213.000 pon. Namun produksinya tidak stabil, bahkan cepat menurun, hal ini terjadi karena adanya

kesalahan-kesalahan cara pemetikan dan pemangkasannya.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) oleh Menteri De Waal dalam tahun 1870 yang memungkinkan pihak swasta mendapat hak guna usaha selama 75 tahun dan kebebasan untuk perluasan perkebunan dengan tidak ada lagi ketergantungan dan izin pegawai-pegawai yang mempunyai kepentingan pada budi daya kopi. Setelah itu lambat laun makin banyak didirikan perkebunan teh. Kontrak-kontrak sewa yang ada diubah menjadi hak guna usaha. Walaupun demikian antara tahun 1870 sampai tahun 1880-an merupakan suatu masa yang cukup sulit bagi budi daya teh, karena tidak semua tanah yang diberikan dalam hak guna usaha untuk pertanian itu ditanami teh.

Perantara-perantara teh yang berdagang teh dari Hindia Inggris banyak memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dengan demikian dapat diketahui oleh para pengusaha teh di Jawa, bahwa Jawa ketinggalan dalam mutu, cara pengolahan maupun jenis tehnya. Salah seorang yang memegang peranan penting dalam pengembangan budi daya teh di Hindia Belanda adalah John Peet, orang Inggris, pendiri suatu firma menggunakan namanya. Dia mengetahui tentang persyaratan pasaran teh, pengolahan teh di Srilangka dan India. Dia menyampaikan pengalaman-pengalamannya kepada pengusaha-pengusaha teh di Jawa.

Pedagang-pedagang perantara Inggris berbaik hati menunjukkan kekurangan-kekurangan dari produk teh Jawa kepada para pengolah yang berkepentingan, dengan disertai contoh-contoh teh yang baik dari India. Akibatnya beberapa perkebunan teh di Jawa terutama di *Afdeeling* Sukabumi mengubah cara-cara kerjanya, dan pada tahun 1878 memesan biji teh dari Assam. Sejak itu jenis ini lebih disukai, baik untuk perluasan dan pergantian yang berangsur-angsur dari tanaman teh yang sudah ada, maupun untuk perkebunan baru karena

lebih cocok dengan tanah dan iklim di Jawa.

Percobaan penanaman teh assam yang pertama dilakukan pada tahun 1872, P. Bosch seorang pekebun senior dari Weltevreden memberitahukan tentang hal ini. Ayahnya adalah seorang pedagang perantara dari firma Dennyson & Co, yang mendatangkan beberapa biji teh Assam dan menyemaikannya di perkebunan (*Onderneming*) Ciguntur dekat Pacet. Pada tahun 1876 tanahnya beralih ke tangan orang lain dan tanaman tehnya menjadi mati karena tidak terurus. Sementara itu L. Baron Van Heeckeren tot Walian, seorang pekebun senior dari S'Gravenhage, mengatakan bahwa masuknya biji-biji teh dari Assam ini terjadi pada tahun 1878, dengan perkebunan Sinagar-Tjirohani (Munjul) yang terletak dekat Cibadak di *Afdeeling* Sukabumi sebagai pelopornya. A. Holle, direktur dari perkebunan tersebut pada tahun itu menerima sejumlah biji (benih) teh Assam dari John Peet. Biji-biji ini kemudian disebar untuk disemaikan.

Pada tahun 1879 diterima sejumlah biji teh, partai kedua, dari van Heeckeren yang disemaikan di Sinagar. Sayang jenis yang terakhir dikirim ini tidak begitu bagus kualitasnya. Biji yang menjadi benih teh dari kebun Munjul kemudian dijual ke perkebunan-perkebunan lainnya.

Perkebunan Teh Sinagar yang terletak di *Afdeeling* Sukabumi menjadi contoh penanaman teh jenis Assam yang baik bagi perkebunan lainnya. Misalnya saja bagi R.E. Kerkhoven administratur dari Gambung (Bandung) yang mengunjungi perkebunan Sinagar pada waktu itu, dalam kurun waktu yang singkat mengikuti jejaknya untuk mencoba menanam teh jenis Assam. Pada tahun 1877 dan tahun berikutnya ia menerima biji teh jenis Assam dari Srilangka dan menyemaikannya di kebunnya. Sayang percobaannya gagal karena teh dari Srilangka ini tidak banyak perbedaannya dengan teh Jawa atau teh Cina. Oleh karena itu, percobaan ini kemudian dihentikan dan baru dimulai lagi setelah Kerkhoven

bersama pamannya, E.J. Kerkhoven dari perkebunan Sinagar memangkas dan mencabut tanaman tersebut. Pada tahun 1882 satu partai biji teh Jaipur dari Assam didatangkan dan ditempatkan di kebunnya, yang kemudian sukses menjadi tanaman teh yang baik dan subur.

Di *Afdeeling* Sukabumi sampai dengan tahun 1880 tercatat sekitar 24 buah persil yang digunakan untuk perkebunan, namun tidak semuanya ditanami teh. Sebagian besar dari persil yang merupakan tanah erpacht ini masih ditanami kopi dan padi. Perkebunan teh saat itu kira-kira baru berjumlah enam buah.

Suksesnya penanaman teh jenis Assam mengakibatkan semakin bersemangatnya para pengusaha perkebunan di *Afdeeling* Sukabumi untuk mengelola perkebunan teh. Pada tahun 1880 untuk pertama kalinya dilakukan impor biji (benih) teh dalam Skala yang besar. John Peet memesannya untuk Albert Holle dari perkebunan (*onderneming*) Munjul, B.B.J. Crone dari Tenjo-Ayu, E.J. Kerkhoven dari Sinagar, G. Mundt dari Parakan Salak dan F. Philippeau dari Cisolak. Perkebunan Teh Munjul berhasil mendapatkan biji-biji teh yang berkualitas sangat baik, dan seperti yang telah disebutkan di muka menjadi perkebunan pertama yang berhasil membudidayakan dan kemudian menjualnya kepada perkebunan lain yang membutuhkannya.

Setelah tahun 1880 perkebunan teh di *Afdeeling* Sukabumi menjadi semakin banyak dan lebih berkembang. Beberapa faktor yang menyebabkannya: Pertama bahwa mulai sekitar tahun-tahun itu bibit teh assam yang ditanam ternyata lebih baik dibandingkan dengan teh jenis bohea (Cina) dan lebih cocok dengan kondisi alam dan iklim di *Afdeeling* Sukabumi khususnya dan di Hindia Belanda umumnya. Teh jenis Assam dapat tumbuh lebih subur dan produksinya lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, semakin baiknya sarana dan sistem transportasi dari dan ke *Afdeeling* Sukabumi. Hal ini menguntungkan bagi

perkebunan teh yang memerlukan transportasi yang murah dan cepat untuk menjual hasil perkebunannya ke pabrik ataupun ke kota. Beberapa jalur lalu-lintas dibuka dan yang sudah ada diperlebar, misalnya saja pada tahun 1881 dibuka jalur lalu lintas kereta api dari Bogor ke Cicurug dan tahun 1882 Cicurug-Sukabumi. Kemudian pada tahun 1883 dibuat jalur Sukabumi-Cianjur.

Faktor ketiga adalah terbentuknya suatu sindikat perkebunan yang bernama *Soekaboemische Landbouw Vereerigine*; (SLV), tanggal 20 Desember 1891. SLV didirikan karena adanya kesadaran di antara para pengusaha perkebunan (pekebun) untuk kerjasama menanggulangi kesukaran-kesukaran yang ada. Di antaranya adalah kemampuan teknis dalam membudidayakan teh yang tidak sama antara perkebunan yang satu dengan perkebunan yang lain, dan adanya beberapa ketidapahaman para pekebun akan perkebunannya.

Antara tahun 1881-1883 beberapa perkebunan di *Afdeeling* Sukabumi terserang penyakit karat, di antaranya adalah Perkebunan Parakan Salak sebanyak 60 bau, Sindengsari 45 bau dan Tenjo-Ayu 30 bau. Oleh karena itu, Mundt pada tahun 1885 belajar ke Srilangka atas usul Parker yang berada di Colombo. Dengan menimba pengetahuan di sana, perbaikan demi perbaikan dan penelitian mengenai keadaan tanah, hama penyakit, pemupukan dan pengolahan yang baik akan teh terus dilakukan agar dapat dicapai basil yang lebih baik. Hal ini dibicarakan dalam rapat-rapat SLV.

Pada tahun 1893 diadakan persetujuan antara E.J. Kerkhoven yang pada waktu itu menjadi wakil ketua SLV dengan direktur Kebun Raya, Dr. Treub. Persetujuan itu menetapkan bahwa beberapa perkebunan akan menyediakan dana untuk menggaji seorang asisten yang akan mempelajari hal-hal yang penting untuk pembudidayaan teh, di laboratorium Kimia Pertanian Kebun Raya. Lohmann, sebagai ahli kimianya diangkat pada

tanggal Juni 1823 dan bekerja di bawah pimpinan dan kerja sama dengan Dr. Von Ronburgh. Ini merupakan permulaan dari *Theeproefstation* (Balai Penelitian Teh) yang kemudian pada tahun 1902 menjadi *Proefstation Voor de Theecultuur* (Balai Penelitian Budidaya Teh). Balai ini merupakan bagian khusus dari Kebun Raya yang dikelola oleh suatu panitia yang ditunjuk oleh SLV. Pada tahun 1905 atas kerja sama SLV dan prakarsa Firma Dunlop Kolft, didirikanlah suatu badan lain yang sangat penting untuk para pekebun teh, yaitu *Thee Expert Bureau* (Biro Ahli Teh), mula-mula di Bandung kemudian di Jakarta. Biro ini banyak berjasa dalam perbaikan produksi teh termasuk produksi dari *Afdeeling* Sukabumi.

Dengan diperbaikinya teknik penanaman dan pengolahannya, teh dari Jawa lambat laun mulai disukai di pasaran London maupun Amsterdam. Hasil tiap hektar makin lama makin hesar, yaitu sebesar 600-750 kg bahkan sampai 1.000 kg tiap bau di atas tanah yang baik dapat dicapai. Tahun 1900 sampai dengan 1914 merupakan masa emas perkebunan teh di Hindia Belanda. Produksinya yang pada tahun 1890 masih rendah menanjak dengan kuatnya, sehingga produksi total dalam tahun 1910 sudah mencapai 18.500.000 kg. Lambat laun jumlah perkebunan bertambah hingga mencapai 200 buah pada tahun itu. Menjelang tahun 1910 keadaan budi daya dan harapan kemudian hari demikian besarnya sehingga terjadi semacam "boom" perkebunan-perkebunan bertambah banyak, pencarian tanah-tanah baru untuk ditanami teh dilakukan dengan giat. Di daerah Priangan boleh dikatakan sudah tidak tersedia tanah lagi. Pada tahun 1913 produksi total perkebunan teh Hindia Belanda mencapai 47.000.000 kg. termasuk dari perkebunan teh di *Afdeeling* Sukabumi.

Walaupun sempat tersendat karena pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Dalam masa emas 1900-1914, perkebunan teh di *Afdeeling* Sukabumi meningkat

kembali dengan pesat. Sampai dengan tahun 1929 harga teh tetap tinggi, demikian pula harga penjualan daun basah. Pembelian atau penjualan daun teh terbanyak antara tahun 1926-1940 didominasi oleh *Afdeeling* Sukabumi (tahun 1921 sudah menjadi kabupaten). Dari sekian banyak perkebunan teh di *Afdeeling* ini ada beberapa perkebunan yang sangat terkenal seperti Perkebunan Teh Parakan Salak, Sinagar-Cirohani, Goalpara, Tenjo-Ayu, Perbawatie dan Artana.

1. Parakan Salak ; terdiri atas kebun-kebun di atas tanah *erfpacht* Calorama I, seluas 688 bau, Calorama II 500 bau, Calorama III 386 bau dan tanah *erfpacht* Pakuwon sebanyak 208 bau jumlah luas keseluruhan perkebunan adalah 1.782 bau. Letaknya di distrik Cicurug di lereng Gunung Perbakti dan Gunung Endut, termasuk wilayah vulkanik Gunung Salak. Perkebunan teh Parakan Salak berada di atas ketinggian 2.000 – 3.000 kaki. Jaraknya lebih kurang 7 paal dari halte kereta api Parung Kuda. Parakan Salak merupakan perkebunan dari *Cultuurmaatschappi* Parakan Salak. Pada tahun 1929 dari luas keseluruhan perkebunan, sebanyak 888 bau lebih ditanami dengan teh assam dan 545 bau ditanami karet.



Gambar 1.

Suasana di Perkebunan Teh Sinagar 1890

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_40jarige_agathisaanplant_Sinagar_TMnr_10012884.jpg
diakses tanggal 2 Januari 2017

2. Sinagar-Cirohani ; terdiri atas tiga tanah *erfpacht* Sinagar-Cirohani 1-III, luasnya masing-masing 1.222 bau, 773 bau dan 49 bau, jadi luas seluruhnya 2.044 bau. Perkebunan ini terletak di distrik Ciheulang di lereng Gunung Gede, kurang lebih tiga paal dari Cibadak dan dekat Karang Tengah. Sedangkan Cirohani berada sekitar 1,5 paal dari Parung Kuda. Sinagar terletak pada ketinggian 503 meter sedangkan Cirohani pada ketinggian 1.300-1.700 kaki, perkebunan ini milik *Cultuurmaatscappij* Sinagar-Tjirohani. Administratur Sinagar yang terakhir menurut data tahun 1929 adalah F.W.H. Jacobs, sedangkan Cirohani adalah J.H. Otto. Tanah perkebunan ini dimiliki sebagai *erfpacht* untuk usaha perkebunan secara hukum. Mulai pada tahun 1841 sampai dengan akhir tahun 1924 sekitar 638,36 hektar memproduksi teh, 561 hektar tidak memproduksi dan sisanya untuk tanaman hevea.
3. Goalpara : mempunyai banyak tanah (persil) sebagai *erfpacht* yaitu Sukangangon I, II, III, Cineros I dan II, Pasir Tangkil I dan II, Tangsel I-IV dan Gekbrong (Pasir Pogor I dan II) serta Pasir Kandang Kuda I dan II. Luas masing-masing persil itu berturut-turut adalah 105, 25, 50, 467, 52, 11, 43, 60, 1, 10, 340 dan 61 bau. Keseluruhannya berjumlah 1.225 bau tanah *erfpacht*, 274 bau tanah sewaan, dan 25 bau merupakan tanah hak *opstal*. Perkebunan ini terletak di distrik Gunung Parang (kemudian menjadi distrik Sukabumi). Administraturnya O.A. Van Polanel Petel. Perusahaan ini mulai memiliki tanah *erfpacht* pada 2 Maret 1886, 13 Oktober 1884, 14 Februari 1893, 10 April 1886, 24 Desember 1920, 31 Agustus 1886, 15 Agustus 1914, 12 Januari 1899, 15 Agustus 1914, 27 Februari 1900 dan 15 Agustus 1914. Pada akhir tahun 1927 tanah yang ditanami teh berjumlah 1.158 bau.
4. Tenjo-Ayu; Perkebunan ini terletak di distrik Cicurug di lereng Gunung Gedeh, lebih kurang 1,5 paal dari halte kereta api Cicurug dan berada di atas ketinggian lebih kurang 1.600 kaki. Terdiri atas tanah *erfpacht* Tenjo-Ayu I dan II yang luasnya masing-masing 257 dan 52 bau. Perkebunan ini juga menerima daun teh dari perkebunan teh rakyat (kampung) Jayasari. Administraturnya D. Van Strelendroft, mulai mempunyai tanah *erfpacht* yang sah pada 17 Januari 1878 dan 22 Februari 1882. Pada akhir tahun 1915, sekitar 77 bau ditanami dengan teh assam.
5. Perbawatie ; terdiri atas kebun-kebun di tanah *erfpacht* Sukasari I dan II, Cibunartani, Slabintana I-IV dan Wanasari I dan II. Perkebunan ini terletak di distrik Gunung Parang (Sukabumi) dengan luas keseluruhannya berjumlah 1.114 bau. Letaknya sekitar 7 paal dari Sukabumi, berada di atas ketinggian 2.835-4.350 kaki dari permukaan air laut. Nama perusahaannya adalah *Cultuurmaatschappij* Perbawatie, dengan administraturnya sebelum depresi ekonomi tahun 1930 adalah N.J. Weelburg. Mulai mempunyai tanah *erfpacht* secara sah untuk usaha perkebunan berturut-turut tanggal 12 Juni 1886, 15 September 1887, 4 Oktober 1887, 4 Desember 1884. Agustus 1888 dan 2 Oktober 1890. Pada akhir tahun 1916 kebun yang khusus ditanami teh seluas lebih kurang 612 bau.
6. Artana (Cibojong); terdiri atas kebun-kebun di tanah *erfpacht* Artana I-IV, Cikerud, Cirajeg dan pasir Sarongge Perkebunan ini memproduksi teh dan karet, luasnya 1.415 bau, terletak di distrik Jampang Tengah sekitar 26 paal dari Sukabumi, dekat kampung Cimerang. Berada di atas ketinggian 1.500-3.000 kaki. Perusahaannya

bernama *Cultuurmaatschappij* Artana, administrasinya menurut data tahun 1929 adalah B.K. Hollander. Mulai secara hukum mempunyai *erfpacht* tanggal 10 Mei 1893, 4 Agustus 1894, 23 November 1896, 11 September 1900, 11 November 1904, 25 September 1907. Di tahun 1927 sekitar 629 bau kebunnya ditanami teh sedangkan sisanya untuk penyemaian benih teh dan perkebunan karet.

b. Jalan Kereta Api

Sarana transportasi kereta api mempunyai arti yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi di Sukabumi, Angkutan kereta api diperlukan untuk memindahkan barang maupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

Selain itu angkutan kereta api dapat menjadi andalan dalam meningkatkan ekspor. Bagi masyarakat Sukabumi kehadiran kereta api memudahkan mobilisasi sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi.

Usulan pembangunan jalan kereta api untuk mengatasi kesulitan prasarana dan sarana transportasi di Pulau Jawa untuk pertahanan, keamanan dan ekonomi awal abad ke-19 muncul dari Kolonel Jhr. Van Der Wijk, seorang militer pada tanggal 15 Agustus 1840. Ia mengusulkan agar di Pulau Jawa dibangun alat transportasi baru, yaitu kereta api. Ia menunjukkan bahwa kereta api di Eropa telah berhasil mengatasi kesulitan serupa. Di Negeri Belanda sendiri telah dibangun jaringan rel yang membuktikan hasil yang cukup baik sebagai sarana pengangkutan. Menurut dia, pemasangan jalan rel di Pulau Jawa akan mendatangkan keuntungan yang tak ternilai harganya bagi kepentingan pertahanan. Yang diusulkannya ialah jalan rel yang terbentang dari Surabaya ke Jakarta melalui Surakarta, Yogyakarta dan Bandung beserta simpangan-simpangannya (Reitsma, 1928: 7).

Usulan tersebut didukung oleh J. Trom, seorang insinyur kepala pada Bagian Pengairan dan Bangunan serta dipandang baik, sehingga pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan surat keputusan (*Kotiinklyk Besluit*) nomor 270 tertanggal 28 Mei 1842 yang menetapkan bahwa pemerintah akan membangun jalan rel dari Semarang ke Kedu dan Yogyakarta/Surakarta. Keputusan tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan sarana transportasi tradisional berupa kereta yang ditarik sapi dan kerbau serta meningkatkan daya angkut bagi barang-barang ekspor (Reitsma, 1928: 7; Jellema, 1929: 10).

Pada tahun 1846 Gubernur Jenderal J.J. Rochussen (1845-1851) mengusulkan kepada pemerintah kerajaan di negeri induknya, Belanda, agar menolak permohonan konsesi dari pihak swasta yang waktu itu menampakkan ketertarikan penanaman modal di bidang transportasi. Ia berpendapat bahwa pengadaan alat transportasi kereta api hendaknya dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu ia mengajukan agar pemerintah menyediakan dana sebesar 2.500.000,00 gulden untuk biaya pemasangan jalan rel antara Jakarta dan Bogor.

Bertolak belakang dengan usul Rochussen, Gubernur Jenderal A.J. Duymaer Van Twist (1851-1856) malah mengajukan usul agar pemerintah kerajaan di Belanda mempertimbangkan usulan konsesi pihak swasta. Usul Twist disetujui oleh parlemen Belanda yang didominasi kaum liberal yang mendukung peran swasta. Sebagai jawaban atas usul-usul tersebut, pada tanggal 31 Oktober 1852 pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan surat keputusan (No. H22, Ind. Stbl. 1853 No. 4) yang menetapkan pemberian kemudahan-kemudahan bagi kalangan pengusaha swasta yang bermaksud untuk mendapat konsesi (izin) pembukaan jalan rel atau usaha alat transportasi kereta api di Pulau Jawa (Reitsma, 1928: 10; Jellema, 1929: 17).

Berdasarkan surat keputusan Raja Belanda tanggal 31 Oktober 1852, banyak kalangan pengusaha swasta mengajukan permohonan konsesi untuk membuka perusahaan kereta api di Pulau Jawa. Beberapa permohonan konsesi itu berasal dari perusahaan perkebunan swasta yang sudah mulai bermunculan. Maksud mereka ialah agar perusahaan mereka bisa lebih mampu mengangkut hasil produksi perkebunan mereka yang mulai melimpah. Sampai tahun 1861 permohonan konsesi kalangan pengusaha swasta itu tidak satu pun diterima dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Belum ada kesepakatan di kalangan pemerintah, apakah perusahaan kereta api itu akan diserahkan kepada pihak pengusaha swasta atau akan dikerjakan oleh pemerintah sendiri.
- 2) Kesulitan lapangan, karena belum ada peta yang dapat dipercaya sehingga harus melakukan penelitian dan pemetaan terlebih dahulu.
- 3) Anggaran biaya yang diajukan oleh para pemohon konsesi masih merupakan perkiraan-perkiraan yang belum nyata.
- 4) Tidak ada data mengenai sarana transportasi, sehingga sulit memperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh (Reitsma, 1928: 7 - 19).
- 5) Sulit menentukan tenaga kerja dan upah kerja mereka (Gani, 1978: 31).

Oleh karena itu, masih diragukan sumber pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian kereta api yang berasal dari mobilitas penduduk dan angkutan barang, apakah akan menguntungkan atau akan mendatangkan kerugian

Pada tahun 1861 Gubernur Jenderal Baron Sloet van den Beele atas arahan Menteri Jajahan menyetujui konsesi swasta. Setahun kemudian konsesi swasta dikabulkan Pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1863 berdiri N.V. NISM (*Naamlouze Venootschap*

Nederlanssch-Indische Spoorweg Maatschappij).

Pada tanggal 27 Maret 1864 konsesi bagi pemasangan jalan rel dan pengoperasian alat angkut kereta api jalur Jakarta-Bogor diperoleh NISM berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Gouvernement atau GB) nomor 1 tanggal 19 Juni 1865 serta surat keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit atau KB) tanggal 22 Juli 1868. Konsesi ini diberikan, karena jalur jalan rel Jakarta-Bogor itu dipandang (1) mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi sebab bertalian erat dengan pengangkutan hasil produksi tanaman ekspor dari wilayah Priangan, seperti kopi, teh, kina; (2) penting ditinjau dari sudut politik dan komunikasi pemerintahan, sebab Bogor menjadi tempat kedudukan Gubernur Jenderal dan pusat administrasi pemerintahan. Begitu pentingnya kedudukan jalan rel ini sehingga pinjaman modalnya diberikan untuk jangka waktu 99 tahun, terhitung dari kereta apinya dioperasikan untuk umum (Oma Sutarma, 1988: 43-44).

Staatsspoorwegen (SS), perusahaan pemerintah mulai turut dalam pembangunan rel dan pengoperasian kereta api. Antara tahun 1884 s.d. tahun 1898 SS membuka 8 jalur kereta api, yakni (1) Pasuruan-Probolinggo tanggal 03-05-1884, (2) Surabaya-Surakarta tahun 1884, (3) Sidoarjo-Madiun-Blitar tanggal 16-05-1884, (4) Bogor-Bandung-Cicalengka tanggal 04-09-1884, (5) Cicalengka-Garut tahun 1896, (6) Yogyakarta-Cilacap tahun 1887, (7) Cicalengka-Cilacap dan (8) Wonokromo-Tarik tahun 1894.

Pembukaan jalur kereta Api Bogor-Bandung-Cicalengka yang melintasi Sukabumi tanggal 4 September 1884 membawa keuntungan bagi perkebunan teh yang memerlukan transportasi yang murah dan cepat untuk

menjual hasil perkebunannya ke pabrik ataupun ke kota.

Beberapa jalur lalu-lintas dibuka dan yang sudah ada diperlebar, misalnya saja pada tahun 1881 dibuka jalur lalu lintas kereta api dari Bogor ke Cicurug dan tahun 1882 Cicurug-Sukabumi. Kemudian pada tahun 1883 dibuat jalur Sukabumi-Cianjur.



Gambar 2. Stasiun kereta api Sukabumi (1880).

Sumber: Katam, Sudarsono.2014. Kereta Api di Priangan Tempoe Doeloe. Bandung : Pustaka Jaya

c. Desentralisasi

Desentralisasi secara resmi diperkenalkan dalam pemerintahan sejak tahun 1903. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari Politik Etis (*Ethische Politiek*) yang gencar dikampanyekan sejak akhir abad XX. Desentralisasi dipandang perlu karena sistem sentralisasi yang selama ini dipergunakan ternyata tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat lokal. Berdasarkan sistem sentralisasi, pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pusat. Tapi berhubungan dengan makin banyaknya urusan yang harus dilayani, maka pekerjaan yang bersifat lokal dan sederhana pun harus diurus pemerintah pusat. Keadaan ini membuat pemerintah pusat tidak mampu lagi memikul beban tugas yang makin berat. Perlu memulai menyerahkan urusan dan kepentingan lokal kepada pemerintah daerah setempat. Ketentuan ini kemudian diundangkan dalam *De Indische Comptabiliteit Wet* (1864). Undang-Undang desentralisasi baru dapat direalisasikan tahun 1903.

Pada prinsipnya Undang-Undang Desentralisasi bertujuan membuka kemungkinan pembentukan daerah otonom dengan nama *Locale Ressorren* (diundangkan dalam *Staatsblad* 1905 No. 181). Untuk melaksanakan tugas-tugas lokal dibentuklah *Locale Raden* (Dewan-Dewan Lokal). Dibentuknya dewan-dewan daerah, walau pada tahun-tahun pertama undang-undang tersebut dijalankan tidak banyak perubahan yang dapat dimunculkan.

Berbagai peraturan yang berkenaan dengan desentralisasi diundangkan antara tahun 1903 hingga 1905:

- 1) *Decentralisatie Wet* (Undang-Undang Desentralisasi) tanggal 23 Juli 1903 yang dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 329.
- 2) *Decentratisatie Bestuit* (Keputusan Pemerintah tentang Desentralisasi) yang dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1905 No. 137.
- 3) *Locale Raden Ordonnantie* (Ordonansi tentang Dewan-Dewan Lokal) yang dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1905 No. 181.

Implementasi dari Ordonansi Dewan-Dewan Lokal adalah dengan pembentukan sejumlah *gemeente* (kotapraja) di kota-kota besar di Jawa. Sebuah *gemeente* diperintah oleh seorang walikota (*burgemeester*) yang dalam tugas-tugasnya didampingi oleh sebuah Dewan Kotapraja (*Gemeente Raad*).

Yang patut disimak dalam hal *gemeente* ini adalah bahwa pembentukannya lebih dilandasi atas dasar besar-kecilnya jumlah warga penduduk bangsa Eropa yang bermukim di suatu tempat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sukabumi menjadi *gemeente* (kotapraja) bersama Semarang, Bandung, Tegal, dan Surabaya. Sebelumnya penetapan *gemeente* ini

menyusul Batavia yang menjadi kota pertama melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1905 No. 204, Meester-Cornelis (sekarang Jatinegara) menurut *Staatsblad* Tahun 1905 No. 206 dan Buitenzorg (sekarang Bogor) (*Staatsblad* Tahun 1905 No. 208) 1 April 1905. Sejak saat itu berbagai kota yang memiliki warga penduduk bangsa Eropa yang jumlahnya dianggap cukup signifikan memperoleh status *gemeente* (kotapraja).

Pada Tahun 1926 *Gemeente* Sukabumi baru memiliki walikota (*Burgermeester*). Seiring kebijakan pemerintah yang menerapkan desentralisasi umum (tidak hanya bidang ekonomi), keluarlah Undang-Undang Perubahan Pemerintah (*Bestuurs hervormingwet*). Sukabumi akhirnya menjadi *Stadsgemeente* (kotapraja). Pada tahun 1939 telah terbentuk 32 kotapraja, 19 di antaranya berada di Pulau Jawa. Tahun 1935 *Gemeente* Meester-Cornelis lain digabungkan dengan Batavia, maka artinya untuk wilayah Keresidenan Batavia hanya ada satu kotapraja.

Dewan Kotapraja (*Gemeente Raad*) adalah badan perwakilan pada tingkat kotapraja yang anggota-anggotanya dipilih untuk masa kerja empat tahun. Menurut *Kiesordonnantie* (Ordonansi tentang Pemilihan) yang dikeluarkan 1 Januari 1908, mereka yang memiliki hak untuk memilih adalah laki-laki, kawula Belanda (*Nederlandsch-onderdaan*), berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dapat membaca-menulis bahasa Belanda (untuk pemilih bumiputra harus menguasai bahasa Melayu dan bahasa daerah yang bersangkutan tinggal), berdomisili di kotapraja tersebut, dan membayar pajak pendapatan minimal sebesar 300 gulden per tahun. Syarat untuk menjadi anggota Dewan Kotapraja tidak jauh berbeda kecuali dari segi umur, yaitu harus minimal 25

tahun, dan penguasaan bahasa Betanda yang cukup.

Melihat persyaratan tersebut di atas, baik untuk menjadi pemilih maupun calon anggota yang akan dipilih, dominasi penduduk warga Eropa dalam keanggotaan Dewan Kotapraja tampak jelas. Seperti terlihat pada keanggotaan Dewan Kotapraja Batavia dari tahun 1905 sampai 1929, ada 173 warga Eropa, 67 bumiputra, dan 19 warga Cina, serta 10 Timur Asing yang umumnya adalah warga Arab."

Dewan-dewan daerah lainnya, seperti Dewan Kabupaten (*Regentschapsraad*) dan Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*), dibentuk mengikuti adanya perubahan pemerintahan tahun 1922.

D. PENUTUP

Sukabumi berawal dari sebuah *district* kemudian berkembang menjadi sebuah *gemeente* (kotapraja). Perkembangan ini dimungkinkan karena letak wilayah Sukabumi yang strategis terutama setelah dibangun jalan raya pos oleh Daendels. Keberadaan Perkebunan teh di Sukabumi menjadi faktor penarik penduduk di sekitar untuk datang ke Sukabumi. Mereka datang mengadu nasib untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akhirnya Sukabumi tumbuh menjadi pusat perekonomian. Penduduk Sukabumi dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman dan diperjualbelikan di pasar. Sukabumi tumbuh. Wilayah ini akhirnya tumbuh dengan sistem hukum dan berkembang ke arah kosmopolitan seperti yang dikemukakan Weber. Kondisi ini menjadikan pertimbangan Pemerintah Hindia Belanda untuk membangun lintasan jalan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Sukabumi. Dengan lintasan jalan kereta api ini kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin berkembang Pemerintah Hindia Belanda juga membangun sejumlah irigasi untuk

mengairi kegiatan pertanian di wilayah Sukabumi. Tidak kurang dari tujuh belas talang air melintas di atas jalan raya yang menghubungkan Bogor dengan Cianjur melalui Sukabumi. Bangsa Eropa berlomba datang ke Sukabumi untuk berinvestasi. Kehadiran dan komposisi penduduk Eropa membawa dampak besar dalam perubahan Sukabumi menjadi sebuah *gemeente*. Kebijakan Desentralisasi dan perubahan pemerintahan negeri (*bestuurshervorming*) memberi ruang bagi mereka untuk menjadikan Sukabumi sebagai daerah otonom. Arsip-arsip yang tersedia menunjukkan bahwa geliat kehidupan ekonomi di wilayah Sukabumi dikendalikan dari Kota Sukabumi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para staf Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan FIB UNPAD, Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membantu penulis mendapatkan berbagai sumber informasi dan dokumen yang dibutuhkan pada penelitian

DAFTAR SUMBER

1. Arsip dan Dokumen

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie. 1872 hal 254.

_____. *voor Nederlandsch-Indie*. 1872 hal 254.

Staatshlad 1914, no. 310 dan 311, tentang Pengesahan Status Sukabumi Kota menjadi *Gemeente*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

2. Buku

Bappeda Kota Sukabumi. 2014. *Basis Data Informasi dan Perencanaan Kota Sukabumi 2014*. Sukabumi: Bappeda.

Budiardjo. Miriam. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.

Daldjoeni. N. 1987.

Geografi Kota dan Desa. Alumni: Bandung.

Encyclopedie van Nederlands indie Derde Deel. 1818. S'Gravenhage Martinus Nijhoff.

Herlina. Nina Lubis dkk. 2000.

Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat. Bandung: Alqaprint.

_____. 2011.

Sejarah Provinsi Jawa Barat Jilid I dan II. Bandung: Pemprov Jabar.

Knaud, J.M. 1980.

Herinneringen aan Soekaboemi. Den Haag: Frans Coene.

Kartodirdjo, Sartono. 1992.

Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Utama.

Lapian AB dkk. 2012.

Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 5. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.

Mukhtar, Asep Mawardi dkk. 2013. *Citra Kota Sukabumi dalam Arsip*. Jakarta: Arsip Nasional RI.

Pemerintah Dati II Kotamadya Sukabumi. 1984.

Soekaboemi Tempoe Doeloe. Sukabumi: Bappeda Sukabumi.

Rahmat, Redi. 1990.

Perkebunan Teh di Afdeeling Sukabumi Akhir Abad XIX – Awal XX (Skripsi). Jakarta: Fasa UI.

Setyamidjaja. Djoehana. 1986. *Budidaya Teh*. Bogor: C.V. Yasaguna.

3. Internet

Asal Usul Teh di Indonesia dari <http://www.tehgelas.com/artikel/asal-usul-teh-di-indonesia/asal-usul-teh-di-indonesia/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_40jarige_agathisaanplant_Sinagar_TMnr_10012884.jpg diakses tanggal 2 Januari 2017